

**EVALUASI PELAKSANAAN SOSIALISASI PENCEGAHAN PMI
NON-PROSEDURAL DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG (DPPO) DI DESA TAMBAKREJO KECAMATAN GURAH
KABUPATEN KEDIRI**

*(Evaluation Of The Implementation Of Socialization For The Prevention Of Non-
Procedural PMI And The Crime Of Trafficking In People (DPPO) In Tambakrejo
Village,
Gurah District, Kediri Regency)*

P-ISSN:2722-502X

<https://journal.poltekim.ac.id/index.php/jaim/article/view/1>

DOI:10.34005/jaim.1

Sania Nizar Putri Ashari

sania.ashari@yahoo.com

Politeknik Imigrasi

Koesmoyo Ponco Aji

ponco@poltekim.ac.id

Politeknik Imigrasi

Abstract: *The rise of cases of non-procedural irregular migrant workers who are treated badly while working abroad has become a problem that is constantly being discussed in the mass media. Direct socialization to the community is expected to reduce the number of cases of Non-Procedural PMI. By targeting areas that send a lot of irregular migrant workers, it is hoped that they can open their eyes to register according to procedures and not be tempted by the incitement of irresponsible and unlawful labor sending agents.*

Keywords: *Non-Procedural Irregular Migrant Workers, Human Trafficking, Socialization, Indonesian Migrant Workers*

Abstrak: Maraknya kasus Pekerja Migran Iregular Non-Prosedural yang mendapat perlakuan tidak baik selama bekerja di luar negeri menjadi sebuah permasalahan yang tidak henti-hentinya dibahas dalam pemberitaan media massa. Sosialisasi langsung kepada masyarakat diharapkan dapat menekan angka kasus PMI NonProsedural. Dengan menarget wilayah yang banyak mengirim Pekerja Migran Iregular, diharapkan dapat membuka mata mereka untuk mendaftarkan diri sesuai prosedur dan tidak tergiur oleh hasutan agen pengirim tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab dan melawan hukum.

Kata Kunci: *Pekerja Migran Iregular Non Prosedural, Perdagangan Orang, Sosialisasi, Tenaga Kerja Indonesia*

PENDAHULUAN

Kemajuan zaman yang dinamis dan globalisasi yang terjadi pada dunia mengubah beberapa tatanan kehidupan dan kebiasaan masyarakat serta memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan manusia khususnya tentang migrasi atau perpindahan manusia yang melintasi batas-batas negara. Desakan ekonomi serta kemudahan akses untuk berpergian keluar negeri menyebabkan beberapa masyarakat lebih memilih untuk bekerja di negara lain.

Pekerja Migran Ireguler Non Prosedural atau biasa disebut dengan PMI Non-Prosedural adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tanpa melalui prosedur yang benar. Prosedur yang tidak benar tersebut dapat berupa pemalsuan dokumen, pemalsuan data, ataupun memberi keterangan yang tidak benar untuk berangkat ke luar negeri. Berbagai macam penyebab mengapa hingga saat ini masih banyak ditemukan kasus-kasus Pekerja Migran Ireguler. Terbatasnya akses informasi terkait bagaimana cara yang benar untuk bermigrasi dan bekerja ke luar negeri, minimnya taraf pendidikan masyarakat, iming-iming kekayaan dan upah kerja yang lebih besar daripada di Indonesia. Ditambah dengan hasutan agen-agen penyalur tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab menjadi beberapa penyebab yang menyebabkan masih banyak terjadi kasus Pekerja Migran Ireguler Non-Prosedural.

Menjelaskan tidak hanya terkait alur-alur dalam proses pendaftaran Pekerja Migran Ireguler secara benar dan sesuai hukum, namun juga menjelaskan bahaya-bahaya apa yang akan dihadapi oleh PMI Non-Prosedural serta kemungkinan terburuk yang akan terjadi jika pergi ke luar negeri secara illegal seperti tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, masyarakat yang tidak memiliki keahlian khusus dan tidak mampu berbahasa asing serta ceritacerita mengenai gegar budaya juga turut

dijelaskan dengan harapan dapat menumbuhkan rasa takut dan kesadaran pada diri masyarakat untuk menaati hukum dan prosedur yang ada.

Pelaksanaan upaya pencegahan Pekerja Migran Indonesia NonProsedural telah gencar dilaksanakan sejak diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jendral Imigrasi Nomor.IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan TKI Non-Prosedural, yang ditetapkan tanggal 24 Februari 2017. Namun demikian, kasus-kasus PMI non-prosedural masih tetap marak terjadi bahkan berdasarkan informasi Disnakertransduk Provinsi Jatim, Pekerja Migran pulang dan tercatat di counter help desk kepulauan Bandara Juanda selama tahun 2018 sebanyak 34.128 orang atau naik 7,8%. Dari jumlah tersebut yang bermasalah sebanyak 806 orang.

Berdasarkan data tersebut, maka memang dipandang perlu untuk mengadakan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat agar masyarakat mengerti dan menjadi langkah preventif sehingga permasalahan tersebut dapat berkurang dan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai instansi yang memberikan salah satu syarat seseorang dapat pergi keluar negeri yaitu Paspor memiliki peran yang penting dalam proses awal pencegahan terjadinya Pekerja Migran Ireguler Non Prosedural. Pada saat memohon paspor, setiap orang akan melakukan wawancara untuk memastikan bahwa pemohon benar-benar pergi ke luar negeri dengan alasan yang jelas. Selain itu, pemohon juga diwajibkan melampirkan surat rekomendasi dari Kementerian Ketenagakerjaan dan PPMI. Jika tidak, maka Imigrasi berhak untuk tidak memberikan dokumen perjalanannya sehingga pemohon tidak dapat melanjutkan prosesnya untuk bekerja di luar negeri.

Desa Tambakrejo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri menjadi salah satu wilayah yang menjadi sasaran pelaksanaan sosialisasi ini karena banyak sekali

penduduk di desa ini adalah pekerja migran ireguler. Dengan banyaknya jumlah masyarakat Desa Tambakrejo yang menjadi pekerja migran ireguler, maka diharapkan dengan diadakannya sosialisasi mengenai pencegahan PMI Non-Prosedural dan bahaya praktik perdagangan orang dapat membuka mata masyarakat setempat sehingga kasus-kasus terkait PMI Non-Prosedural tidak akan terjadi lagi dalam masyarakat.

METODE

Kegiatan sosialisasi pencegahan PMI Non-Prosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (DPPO) di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dilaksanakan pada Rabu, 18 November 2020 bersama dengan Bea Cukai Kota Kediri dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Kediri. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Tambakrejo dengan jumlah masyarakat yang hadir sebanyak 72 orang. Tiga hari sebelum dilaksanakannya kegiatan Taruna Politeknik Imigrasi bersama dengan Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Kediri melakukan survey ke lokasi dan membagikan selebaran dan undangan terbuka kepada masyarakat setempat untuk menghadiri acara sosialisasi ini. Selain itu, untuk menambah jumlah peserta dan agar menjangkau masyarakat yang lebih luas, Kepala Desa Tambakrejo memerintahkan setiap Ketua RW untuk memberi pengumuman melalui pengeras suara atau selebaran. Pengiriman undangan juga dilaksanakan untuk mengundang Perwakilan Kantor Bea Cukai Kota Kediri dan Perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Kediri. Untuk metode penyampaian secara langsung dan penjelasan runtut tentang bahaya menjadi PMI Non-Prosedural.

Penjelasan ditampilkan melalui *slideshow Power Point* agar setiap masyarakat dapat melihat dengan baik penjelasan yang diberikan oleh narasumber.



Gambar 1: Taruna Politeknik Imigrasi sedang memberikan penjelasan tentang Pekerja Migran Ireguler kepada Masyarakat



Gambar 2: Pemaparan Materi Kepada Masyarakat Desa Tambakrejo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri

Selain itu juga dilakukan pemaparan kasus-kasus perdagangan orang, serta bagaimana cara untuk menjadi pekerja migran ireguler yang sesuai prosedur.



Gambar 3: Pemaparan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang

Setelah itu, diberikan waktu untuk diskusi tanya-jawab serta pembagian selebaran terkait informasi pelayanan paspor yang menjadi syarat untuk dapat pergi ke luar negeri.

Gambar 4: Pembagian flyer/selebaran tentang tata cara/prosedur menjadi Pekerja Migran Ireguler yang sesuai dengan hukum



HASIL DAN CAPAIAN

Pelaksanaan sosialisasi berjalan dengan lancar dan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyak masyarakat yang antusias dan bersemangat untuk menanyakan hal-hal yang belum mereka ketahui kepada narasumber. Hal tersebut menjelaskan bahwa masyarakat setempat memperhatikan dengan baik apa yang disampaikan narasumber dan menunjukkan adanya motivasi dalam diri masyarakat agar terhindar dari menjadi pekerja migran irregular nonprosedural.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan Sosialisasi Pencegahan PMI NonProsedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (DPPO) di Desa Tambakrejo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri berjalan dengan baik, terlihat dari antusiasme masyarakat dalam tanya jawab dan mencari informasi tentang alur pendaftaran sebagai calon pekerja migran ireguler yang sesuai aturan.

SARAN

Diharapkan kedepannya Taruna-Taruni Politeknik Imigrasi dapat lebih berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi seperti ini. Mengingat bahwa tingkat pekerja migran ireguler yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dengan partisipasi aktif Taruna, diharapkan dapat menjangkau segala lapisan masyarakat khususnya para pemuda dan pemudi tamatan sekolah menengah atas atau kejuruan yang mudah sekali terhasut oleh lowongan pekerjaan ke luar negeri yang tidak jelas prosedurnya.

Selain itu, partisipasi aktif Taruna juga dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi terkait pekerja migran irregular di sekolah-sekolah, lembaga kursus, dan social media. Sehingga, masyarakat akan semakin waspada akan praktek-praktek tidak jelas dari agen penyalur tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Kepala Desa beserta seluruh perangkat desa dan tiga pilar Desa Tambakrejo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri serta masyarakat setempat atas dukungan dan antusiasmenya dalam membantu terlaksananya kegiatan sosialisasi ini dengan lancar hingga akhir acara.